PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Sabtu Tanggal: 22 Januari 2011 Halaman: 13

Fokus Tangani Bencana Besar

JOGJA - Pemkot Jogja memiliki lembaga baru untuk menangani bencana. Lembaga tersebut bernama Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana (BKPBD) Kota Jogja. Badan ini direncanakan menjadi lembaga yang fokus menangani bencana besar yang terjadi di Kota Jogja yang terintegrasi dengan instansi terkait.

"Sehingga tidak ada dalam penanganan bencana instansi datang satu per satu. Mulai dari TNI, polisi, dan instansi yang lain akan terkoordinasi dalam satu wadah yang bernama BKPBD," ungkap Asisten I Sekretaris Daerah M Sardjono di kompleks balai kota, kemarin (21/1).

Sardjono menuturkan, bencana banjir lahar dingin akibat erupsi Merapi di akhir 2010, menjadi pelajaran pemkot untuk membentuk BKPBD. Sebab, bencana banjir lahar dingin lalu yang termasuk besar.

Belajar dari bencana banjir lahar dingin di Code dan ambrolnya talud di muara Winongo dan Buntung, pemkot segera membentuk BKPBD ini •

Banjir Lahar Dingin Prioritas Pertama

■ **FOKUS...**

Sambungan dari hal 13

Pemkot tak ingin saat terjadi bencana serupa, masyarakat harus menunggu mendapatkan bantuan karena alasan prosedural instansi.

"Untuk memotong prosedur tersebut dan lebih maksimal dalam penanganan bencana, makanya koordinasi antarinstansi dibangun di BKPBD ini," tambah Assekda II Eko Suryo Maharso.

Mantan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Jogja ini menerangkan, pembentukan BKPBD juga terintegrasi sampai masyarakat tingkat bawah. Dari RW sampai kelurahan terlibat dalam struktur BKPBD ini.

"Sehingga jika terjadi bencana, lapor RW sudah sampai ke BKPBD. Kemudian, struktur memetakan bencana yang terjadi untuk dilakukan penanganan," imbuhnya.

Setelah BKPBD memetakan bencana yang terjadi, pihaknya langsung melakukan koordinasi penanganan. Misalnya, pemenuhan kebutuhan masyarakat korban bencana, perbaikan fasilitas umum yang rusak, dan perawatan korban bencana akan langsung dikoordinasikan dengan instansi terkait.

"Jadi masyarakat tak perlu lapor ke instansi A meminta kebutuhan makanan, ke B kesehatan, dan seterusnya. Laporan masuk ke BKPD yang langsung ada eksekusi korban," jelasnya.

Selain ketugasan saat tanggap darurat, BKPBD juga memiliki tugas pencegahan bencana dan rehabilitasi. Kedua tugas utama itu bakal diperankan ke masing-masing instansi mulai yang masuk dalam struktur BKPBD.

BKPD akan melibatkan unsur Muspida dari TNI dan Polri, dan profesional ahli dalam hal bencana. Mereka yang akan mengarahkan penanganan bencana sesuai kajian ilmiah. "Seluruh masyarakat terlibat dalam BKPBD ini," imbuh Sardjono lagi.

Pembentukan BKPBD ini terealisasi setelah wali kota mengeluarkan Keputusan Wali Kota (Kepwal) No. 34 tahun 2011. Kepwal ini sebagai juklak dan juknis dari Perda No. 15 tahun 2009.

"Dalam Permendagri 46/2008 sebenarnya yang wajib adalah pemerintah provinsi. Tingkat kabupaten dan kota boleh membentuk atau tidak, prinsipnya tidak wajib," katanya.

Pekerjaan pertama dari BKPBD ini adalah menangani bencana banjir lahar dingin di Kali Code yang belum juga usai. BKPBD telah merencanakan untuk menyiapkan lahan huntara dan shelter bagi warga yang enggan pindah ke huntara.

"Itu sudah berjalan sebelum BKPBD ini terbentuk. Jadi, saat ini kami hanya melanjutkan dari penanganan yang saat ini tengah berjalan," jelasnya.

Sementara itu hujan deras yang mengguyur Kota Jogja dan lereng Merapi membuat air dari Kali Code sempat meluap je beberapa titik. Termasuk di Tegalpanggung, yang arus airnya tertahan bangkai jembatan yang ambrol Kamis pagi (20/1).

Bongkahan bekas jembatan pejalan kaki itu membuat warga di Tegalpanggung mendesak pemkot segera melakukan penanganan. Mereka ingin pemkot mengangkat bongkahan tersebut. **(eri)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian dan Pemba 3. Bagian Organisasi 4. Kantor Penanggulangan Kebakara	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005